

ABSTRAK

PENGAWASAN BAKU MUTU AIR LIMBAH TAHU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DI KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA TIMUR

Pengawasan terkait dengan baku mutu air dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengendalikan pencemaran air untuk limbah industri tahu mengandung polutan organik dan anorganik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan baku mutu air limbah tahu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah di Kecamatan Cakung Kota Administratif Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara sosiogis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Pengawasan terkait dengan baku mutu air dilakukan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur didasarkan Pasal 74 huruf (g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu petugas mengambil sampel limbah cair tahu diperiksa kadar baku mutu yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu memiliki parameter pH BOD, TSS, COD dan minyak serta lemak yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengolahan Kedelai. Apabila terdapat kadar BOD dan COD yang melebihi batas yang ditentukan, maka petugas langsung memberikan teguran secara lisan kepada pihak pengusaha tahu hal ini sesuai dengan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif berupa teguran lisan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan baku mutu air di Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur, diantaranya yaitu kendala internal yaitu minimnya aparat di lapangan sehingga aparat tidak dapat mengawasi secara terpadu, belum adanya laboratorium serta anggaran dalam pembangunan laboratorium sebagai penunjang pengawasan. Sedangkan kendala eksternalnya yaitu penanggung jawab usaha dari pemilik industri tahu yang tidak mengikuti setiap peraturan yang telah ditetapkan.

Kata kunci : Pengawasan, Baku Mutu Air

ABSTRACT

SUPERVISION OF WASTE WATER QUALITY STANDARDS BASED ON REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT NUMBER 5 OF 2014 CONCERNING WASTEWATER QUALITY STANDARDS IN CAKUNG DISTRICT, EAST JAKARTA ADMINISTRATIVE CITY

Supervision related to water quality standards carried out by the government aims to control water pollution for tofu industrial waste containing organic and inorganic pollutants. This study aims to determine and analyze the quality standards of tofu waste water control based on the Regulation of the Minister of the Environment Number 5 of 2014 concerning Wastewater Quality Standards in Cakung District, East Jakarta Administrative City. This study uses a sociological legal approach, with descriptive research specifications. In this study, the data sources used were secondary data and primary data. The data obtained are presented in a systematic and detailed manner, and the data analysis is carried out qualitatively.

From the results of the research and discussion, it can be seen that the supervision related to water quality standards is carried out by the Environmental Service Office of the City of East Jakarta Administration based on Article 74 letter (g) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, namely officers taking waste samples Liquid tofu is checked for quality standard levels produced from the process of making tofu with pH parameters BOD, TSS, COD and oil and fat based on the Regulation of the Minister of the Environment of the Republic of Indonesia No. 5 of 2014 concerning Wastewater Quality Standards, Wastewater Quality Standards for Businesses And/or Soybean Processing Activities. If there are BOD and COD levels that exceed the specified limit, the officer immediately gives a verbal warning to the entrepreneur knowing this is in accordance with Article 76 Paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, administrative sanctions in the form of verbal warning. The obstacles faced in monitoring water quality standards in the Cakung District, East Jakarta Administration City, include internal constraints, namely the lack of officers in the field so that the officers cannot supervise in an integrated manner, the absence of laboratories and the budget for laboratory construction to support supervision. Meanwhile, the external constraint is the person in charge of the business from the tofu industry owner who does not follow any established regulations.

Keywords: Supervision, Water Quality Standard